

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU DAYA TARIK INVESTASI DAN HUBUNGANNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL DI INDONESIA

Raisa Yamani¹⁾, Irsad Lubis^{2)*} Ahmad Albar Tanjung³⁾

Study Program of Magister Economic Development, Faculty of Economics and
Business, Universitas Sumatera Utara, Jl. Prof. T.M.Hanafiah, SH Kampus USU,
Medan, 20155, INDONESIA

e-mail: raisa.yamani150217@gmail.com¹⁾ irsad@usu.ac.id^{2)*} alb4rt4njung@gmail.com³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu daya tarik investasi dan hubungannya terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Variabel yang diteliti meliputi infrastruktur, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, inflasi, dan kriminalitas sebagai variabel independen; investasi sebagai variabel intervening; serta pertumbuhan ekonomi regional sebagai variabel dependen. Data penelitian menggunakan data panel yang terdiri dari data cross-section provinsi di Indonesia dan data time-series periode 2018–2023. Penelitian ini menggunakan analisis dengan metode path analysis melalui pendekatan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi, sementara kriminalitas berpengaruh negatif signifikan. Selain itu, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, dan kriminalitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional, akan tetapi inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Sedangkan infrastruktur berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Secara tidak langsung, infrastruktur, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, dan inflasi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional melalui peningkatan investasi, sedangkan kriminalitas menurunkan pertumbuhan ekonomi regional melalui jalur yang sama. Temuan ini sejalan dengan teori Harrod-Domar dan Teori Pertumbuhan Endogen yang menekankan peran investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan kapasitas tenaga kerja, peningkatan efektivitas belanja pemerintah, pengendalian inflasi, serta penurunan tingkat kriminalitas untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dan pelaku investasi dalam memperkuat daya tarik investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Infrastruktur, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah, Inflasi, Kriminalitas, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi Regional, Analisis Jalur

Abstract

This study aims to analyse the factors determining investment attractiveness and its relationship with regional economic growth in Indonesia. The variables studied include infrastructure, labour, government expenditure, inflation, and crime as independent variables; investment as an intervening variable; and regional economic growth as a dependent variable. The research data uses panel data consisting of cross-sectional data from provinces in Indonesia and time-series data for the 2018–2023 period. This study uses analysis with the path analysis method through the Partial Least Square (PLS)

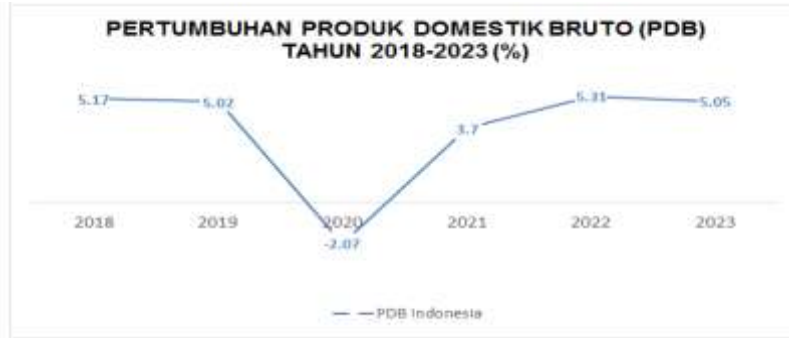
approach. The results of the study indicate that infrastructure, labour, government expenditure, and inflation have a positive and significant effect on investment, while crime has a significant negative effect. In addition, labour, government expenditure, and crime have been shown to have a positive and significant effect on regional economic growth, but inflation has a positive and insignificant effect on regional economic growth. Meanwhile, infrastructure has a significant negative effect on regional economic growth. Indirectly, infrastructure, labour, government expenditure, and inflation are able to increase regional economic growth through increased investment, while crime reduces regional economic growth through the same channel. These findings are in line with the Harrod-Domar theory and the Endogenous Growth Theory, which emphasise the role of investment as the main driver of economic growth. The policy implications of this study emphasise the importance of improving infrastructure quality, strengthening labour capacity, increasing the effectiveness of government spending, controlling inflation, and reducing crime rates to create a conducive investment climate. Thus, the results of this study can serve as strategic input for local governments and investors in strengthening investment attractiveness and promoting sustainable regional economic growth.

Keywords: *Infrastructure, Labour, Government Expenditure, Inflation, Crime, Investment, Regional Economic Growth, Path Analysis.*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor fundamental, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tenaga kerja. Ketiga aspek ini merupakan agenda penting dalam kebijakan makroekonomi bagi berbagai negara, termasuk Indonesia, karena berperan signifikan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Di antara faktor-faktor tersebut, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kualitas hidup warganya. Menurut (Todaro, 2005), peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting dalam menilai kesuksesan pembangunan nasional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, tujuan dari pembangunan nasional adalah membangun masyarakat yang adil dan makmur secara menyeluruh, baik dari aspek material maupun spiritual. Menurut (Sholikhah, 2022), keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara terutama dinilai melalui tingkat pertumbuhannya. PDRB menjadi tolok ukur yang menggambarkan kondisi perekonomian di tingkat regional dan memberikan pandangan terkait kontribusi sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Indikator ini juga berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi yang telah diterapkan oleh pemerintah serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui pemahaman indikator ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 1.
Pertumbuhan PDB Indonesia 2018-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 1 pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023, terlihat adanya dinamika yang mencerminkan tantangan dan pemulihan ekonomi selama periode tersebut. Pada tahun 2018 dan 2019, perekonomian Indonesia tumbuh secara konsisten dengan tren positif. Namun, pada tahun 2020, laju pertumbuhan mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan gangguan signifikan pada berbagai sektor ekonomi, terutama sektor konsumsi dan investasi.

Meskipun demikian, perekonomian mulai pulih pada tahun 2021, didorong oleh berbagai kebijakan pemulihan ekonomi, seperti peningkatan belanja pemerintah dan pemulihan aktivitas perdagangan. Pemulihan ini terus berlanjut hingga tahun 2022 dan 2023, di mana pertumbuhan ekonomi kembali mencatatkan tren yang lebih stabil dan positif. Pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2023 menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam mengatasi dampak pandemi dan mengelola tantangan global, seperti inflasi dan ketidakpastian geopolitik. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan Teori Pertumbuhan Neoklasik (Solow-Swan Model), yang menekankan pentingnya akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi sebagai faktor utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.



Gambar 1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dan Daerah Indonesia 2018-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

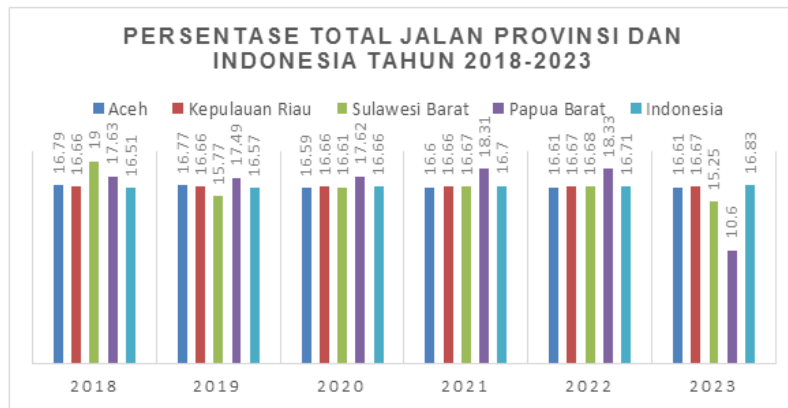
Berdasarkan data pada Gambar 2 pertumbuhan PDRB di beberapa provinsi di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan pola yang bervariasi, memberikan gambaran tentang dinamika ekonomi di tingkat regional. Provinsi Riau mencatat pertumbuhan yang cenderung stabil namun secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional, kecuali pada tahun 2022. Dinamika ini menegaskan adanya disparitas pertumbuhan ekonomi di antara provinsi-provinsi di Indonesia. Beberapa provinsi, seperti

Riau dan NTB, yang pertumbuhannya berada di bawah rata-rata nasional, menghadapi tantangan struktural yang membutuhkan intervensi kebijakan lebih spesifik. Sebaliknya, provinsi seperti Sulawesi Tengah, yang berhasil menarik investasi besar, menunjukkan bagaimana sektor unggulan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, kebijakan investasi memegang peranan penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi. Menurut (Zaenuddin, 2009), investasi atau penanaman modal, baik yang berasal dari dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA), umumnya bergantung pada daya tarik suatu daerah atau negara. Untuk menarik investor, diperlukan iklim investasi yang kondusif serta kemudahan dan kejelasan dalam prosedur penanaman modal. Investasi dianggap sebagai salah satu solusi yang penting untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi antar daerah di Indonesia. Ketimpangan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia masih menjadi tantangan yang cukup besar, di mana beberapa daerah memiliki daya tarik investasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.



Gambar 2
Persentase Total Investasi Provinsi Dan Indonesia 2018-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data investasi pada Gambar 3 dari tahun 2018 hingga 2023, terlihat adanya perbedaan signifikan antara pertumbuhan investasi di tingkat nasional (Indonesia) dengan beberapa provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Riau, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Fenomena ini mencerminkan disparitas yang terus berlangsung di Indonesia, di mana tidak semua wilayah mengalami perkembangan investasi yang sejalan dengan rata-rata nasional. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara provinsi dan tingkat nasional. Dalam konteks ini, provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat lebih mampu menyerap investasi besar berkat infrastruktur yang memadai dan sektor ekonomi yang beragam, sementara Riau dan NTB menunjukkan pola yang lebih terpengaruh oleh volatilitas sektor tertentu yang merujuk pada ketidakstabilan atau fluktuasi output, pendapatan, atau investasi yang disebabkan sektor ekonomi tertentu yang dominan di suatu daerah (Todaro, 2015). Faktor-faktor yang memengaruhi daya tarik investasi daerah sangatlah kompleks dan multidimensional karena melibatkan interaksi antara kondisi ekonomi, politik, sosial, geografis, hingga kualitas tata kelola pemerintahan. Daerah dengan infrastruktur yang baik cenderung lebih menarik bagi investor karena memberikan jaminan akan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta meminimalisir biaya produksi.



Gambar 3
Persentase Total Panjang Jalan Provinsi Dan Indonesia Tahun 2018-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan Gambar 4 dapat diketahui bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan di tingkat nasional dari tahun 2018 hingga 2023. Namun, tren yang berbeda terlihat di beberapa provinsi seperti Aceh, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Tingkat nasional menunjukkan peningkatan panjang jalan yang konsisten setiap tahunnya, sementara beberapa provinsi mengalami stagnasi, fluktuasi, atau bahkan penurunan panjang jalan.

Fenomena ini menunjukkan adanya disparitas pembangunan antara tingkat nasional dan daerah, di mana beberapa provinsi tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur. Ketimpangan ini dapat disebabkan oleh perbedaan alokasi sumber daya, tantangan geografis, atau prioritas pembangunan yang tidak merata. Kondisi ini berpotensi menghambat tercapainya pemerataan pembangunan yang diupayakan melalui berbagai program nasional.

Selain infrastruktur, menurut (Porter, 1990) tenaga kerja merupakan faktor penting lainnya yang berperan dalam menentukan tingkat daya saing suatu daerah. Faktor tenaga kerja ini juga tidak lepas dari peran pemerintah dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Pemerintah daerah yang aktif dalam meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui program pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi cenderung lebih berhasil dalam menarik investor dan menciptakan lapangan kerja baru. Di samping itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan institusi pendidikan sangat penting untuk memastikan adanya keselarasan antara kualifikasi tenaga kerja yang tersedia dan kebutuhan industri di wilayah tersebut.



Gambar 4
Persentase Tenaga Kerja Formal Indonesia Dan Beberapa Provinsi Tahun 2018-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

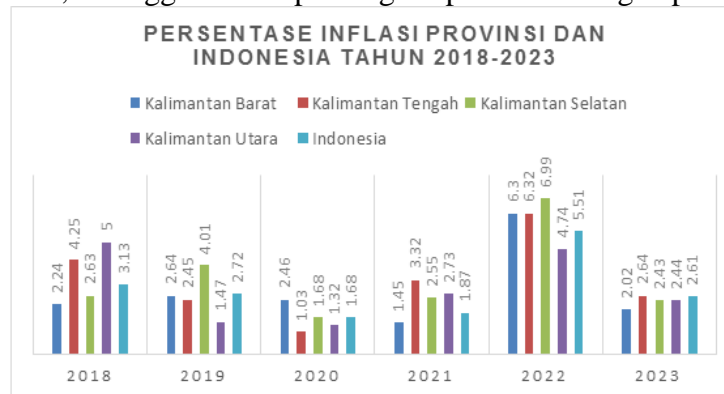
Berdasarkan persentase jumlah tenaga kerja pada Gambar 5 tingkat nasional menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2018 hingga 2023. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan dan program nasional dalam mendukung perluasan lapangan kerja dan partisipasi tenaga kerja. Namun, pola serupa tidak sepenuhnya tercermin di tingkat provinsi, di mana beberapa wilayah seperti Papua, Papua Barat, Maluku, dan Kepulauan Riau menunjukkan tren yang bervariasi dan jauh berbeda dari tren nasional.

Perbedaan pada gambar menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat nasional dan provinsi-provinsi tersebut. Jika tren nasional terus mengalami pertumbuhan yang konsisten, beberapa provinsi justru menghadapi stagnasi, fluktuasi, atau bahkan penurunan. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam distribusi pembangunan tenaga kerja di Indonesia, di mana wilayah-wilayah tertentu mendapatkan manfaat lebih besar dibandingkan wilayah lainnya. Selain itu, pengeluaran pemerintah dalam bentuk investasi publik berperan penting dalam menciptakan daya tarik investasi bagi berbagai daerah.



Gambar 5
Persentase Belanja Modal Pemerintah Provinsi dan Indonesia Tahun 2018-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan data Realisasi Pengeluaran Pemerintah Belanja Daerah, pada Gambar 6 tingkat nasional menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2018 hingga 2023. Tren ini mencerminkan keberhasilan kebijakan fiskal dalam mendukung pengeluaran pemerintah untuk pembangunan. Namun, pola yang sama tidak sepenuhnya tercermin di tingkat provinsi, khususnya di wilayah seperti Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Namun, kondisi makroekonomi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi. Salah satu indikator penting yang harus diperhatikan adalah inflasi. Tingkat inflasi yang berlebihan akan meningkatkan biaya operasional dan mengurangi daya beli masyarakat, sehingga berdampak negatif pada keuntungan perusahaan.



Gambar 6
Persentase Inflasi Indonesia Dan Provinsi Priode Desember Tahun 2018-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan tren inflasi yang terdapat pada Gambar 7 tingkat nasional menunjukkan pola fluktuatif yang stabil dari tahun 2018 hingga 2023, dengan penurunan dan kenaikan yang relatif terkendali. Tren ini mencerminkan efektivitas kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas harga secara nasional. Namun, pola yang terjadi di beberapa provinsi di Kalimantan tidak sepenuhnya sejalan dengan tren inflasi nasional, menampilkan variasi yang signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kesenjangan tingkat inflasi antarprovinsi ini mencerminkan perbedaan dalam struktur ekonomi, tingkat konsumsi, dan dinamika pasar regional. Perubahan inflasi yang tidak stabil ini menyoroti pentingnya kebijakan makroekonomi yang tepat dalam menjaga inflasi agar tetap terkendali. Ketidakstabilan inflasi dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor dan menurunkan daya tarik suatu wilayah sebagai tujuan investasi. Inflasi yang tinggi meningkatkan biaya operasional dan berpotensi menurunkan profitabilitas, yang pada akhirnya mengurangi minat investor dalam berinvestasi di sektor-sektor tertentu.



Gambar 7
Jumlah Kasus Kriminalitas Provinsi Di Indonesia Tahun 2018-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data jumlah tindak pidana dari tahun 2018 hingga 2023 yang dirilis oleh Kepolisian Daerah, tingkat kriminalitas di Indonesia menunjukkan tren yang umumnya meningkat, meskipun dengan variasi antarwilayah. Jumlah tindak pidana yang tinggi dapat menjadi indikator menurunnya tingkat keamanan di suatu daerah, yang pada akhirnya dapat memengaruhi minat investor dalam menanamkan modalnya. Keamanan investasi merupakan faktor krusial bagi terciptanya iklim investasi yang kondusif, karena risiko sosial seperti kejahatan memiliki pengaruh langsung terhadap biaya operasional, jaminan perlindungan aset, dan ekspektasi keuntungan investor.

Dari berbagai temuan yang ada, terlihat adanya ketidaksesuaian antara hasil-hasil penelitian, yang membuka peluang untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang dapat memediasi atau bahkan melemahkan pengaruh positif infrastruktur, investasi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif faktor-faktor penentu daya tarik investasi, yang meliputi Infrastruktur (INFR), Tenaga Kerja (TK), Pengeluaran Pemerintah (PP), Inflasi (INF), dan Kriminalitas (KRM) serta bagaimana faktor-faktor tersebut berhubungan dengan Pertumbuhan Ekonomi Regional (PER) melalui Investasi (INV) sebagai variabel intervening. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Investasi Dan Hubungannya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia”**.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan memasukkan variabel kriminalitas sebagai faktor penentu investasi dan pertumbuhan ekonomi, sesuatu yang masih jarang

dikaji secara eksplisit dalam penelitian regional di Indonesia. Sebagian besar studi hanya menekankan faktor ekonomi—seperti inflasi, belanja pemerintah, atau tenaga kerja—tanpa mengintegrasikan aspek keamanan sebagai determinan utama arus investasi. Kebaruan lain terletak pada penggunaan metode path analysis berbasis Partial Least Square (PLS) untuk menganalisis hubungan kompleks antara variabel ekonomi dan sosial. Sebagian besar penelitian sejenis menggunakan regresi panel konvensional (FE/RE), sementara model PLS memungkinkan pengujian mediasi investasi secara lebih komprehensif, termasuk pengaruh tidak langsung yang sering diabaikan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Infrastruktur

Menurut (Grigg, 2000), infrastruktur merupakan sistem fisik yang berfungsi menyediakan berbagai kebutuhan mendasar bagi masyarakat, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Infrastruktur mencakup berbagai elemen penting seperti transportasi, pengairan, drainase, gedung-gedung, serta fasilitas publik lainnya yang dirancang untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Selain itu, sistem infrastruktur berperan sebagai tulang punggung utama yang memungkinkan sistem sosial dan ekonomi beroperasi secara optimal.

Tenaga Kerja

(Boediono, 1992) mengemukakan bahwa tenaga kerja adalah salah satu komponen penting dalam faktor produksi yang berperan dalam proses produksi barang dan jasa. Dalam proses ini, tenaga kerja mendapatkan pendapatan sebagai imbalan atas jasa yang mereka berikan, yang umumnya disebut sebagai upah. Permintaan tenaga kerja, dalam konteks ini, mengacu pada jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pengusaha pada berbagai tingkat upah yang ditawarkan. Semakin tinggi upah yang ditawarkan, biasanya akan semakin sedikit permintaan tenaga kerja, dan sebaliknya (Felber et al., 2021).

Pengeluaran Pemerintah

Menurut (Colm, 1960), pengeluaran pemerintah untuk sektor publik memiliki sifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Artinya, ketika perekonomian berkembang, pengeluaran publik cenderung meningkat sejalan dengan pertumbuhan tersebut, mencerminkan kebutuhan yang lebih besar akan layanan publik, infrastruktur, dan program kesejahteraan. Peningkatan ini dapat berupa alokasi anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan. Elastisitas ini juga menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan melalui kebijakan fiskal.

Inflasi

Inflasi adalah salah satu tantangan terbesar dalam ekonomi modern. Ia sering kali dianggap sebagai ancaman serius yang, jika tidak ditangani dengan baik, dapat merusak atau bahkan menghancurkan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai selama dekade. Inflasi tidak hanya berdampak pada angka-angka statistik, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena mempengaruhi daya beli dan stabilitas harga.

Kriminalitas

Kriminalitas merupakan sebuah fenomena yang lengkap untuk dipahami melalui berbagai sudut pandang yang berbeda. Studi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas kriminal atau kejahatan telah lama dilakukan oleh filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Secara etimologi kriminologi berasal dari kata crimen yang artinya kejahatan dan logos yang artinya pengetahuan atau ilmu pengetahuan sehingga kriminologi dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori (explanatory research) yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen (infrastruktur, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, inflasi, dan kriminalitas), variabel intervening (investasi), dan variabel dependen (pertumbuhan ekonomi regional). Pendekatan ini dipilih untuk menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung melalui metode path analysis berbasis Partial Least Square (PLS). Penelitian dilakukan pada tingkat provinsi di Indonesia, dengan menggunakan data panel yang mencakup 34 provinsi (menyesuaikan ketersediaan data) dalam periode 2018–2023. Pemilihan periode ini mempertimbangkan dinamika ekonomi sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi resmi, antara lain: Badan Pusat Statistik (BPS) – Data PDRB, tenaga kerja, inflasi, kriminalitas, infrastruktur, Kementerian Keuangan. Variabel yang diteliti meliputi infrastruktur, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, inflasi, dan kriminalitas sebagai variabel independen; investasi sebagai variabel intervening; serta pertumbuhan ekonomi regional sebagai variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Excess Kurtosis	Skewness
Infrastruktur	-0.839	-0.089
Tenaga Kerja	0.108	0.527
Pengeluaran Pemerintah	0.468	0.825
Inflasi	-0.424	-0.023
Kriminalitas	-0.470	-0.062
Pertumbuhan Ekonomi Regional	-0.414	0.510
Investasi	-0.357	-0.277

Sumber: Diolah Oleh Peneliti dengan SmartPLS, Path Analysis (2025)

Menurut Hair et al (2017), apabila nilai skewness tidak ada yang $> -2,000$ hingga $> 2,000$ dan nilai kurtosis $> -7,000$ hingga $> 7,000$ maka distribusi data penelitian yang dilakukan dapat dikatakan normal dan penelitian selanjutnya dapat dilakukan yakni pemodelan Analisis Jalur Path (*Path Analysis*). Berdasarkan hasil analisis pada tabel terlihat bahwa nilai nilai skewness dari masing-masing variabel tidak lebih besar dari -2 hingga 2. Serta untuk nilai kurtosis tidak lebih besar dari -7 hingga 7.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Pertumbuhan Ekonomi Regional	Investasi
Infrastruktur	1.539	1.505
Tenaga Kerja	3.748	3.472
Pengeluaran Pemerintah	4.786	4.295
Inflasi	2.008	1.946
Kriminalitas	2.945	2.801
Investasi	2.415	

Sumber: Diolah Oleh Peneliti dengan SmartPLS, Path Analysis (2025)

Nilai VIF setiap variabel dapat dilihat pada Tabel 2 dengan penjelasan bahwa seluruh variabel Infrastruktur, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, inflasi, keamanan, dan investasi memiliki nilai VIF lebih kecil dari 5. Hal tersebut mengartikan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas, hubungan antar variabel dianggap tidak terlalu kuat.

3. Uji Heterokedastisitas

Tabel 3
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Test-Statistic	P Value
Pertumbuhan Ekonomi Regional	4,194	0,198
Investasi	4,322	0,227

Sumber: Diolah Oleh Peneliti dengan SmartPLS, Path Analysis (2025)

Berdasarkan Tabel 3 diatas terlihat bahwa *Breusch Pagan Testa* nilai P Value > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi nonheteroskedastisitas terpenuhi atau dengan kata lain Homokedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

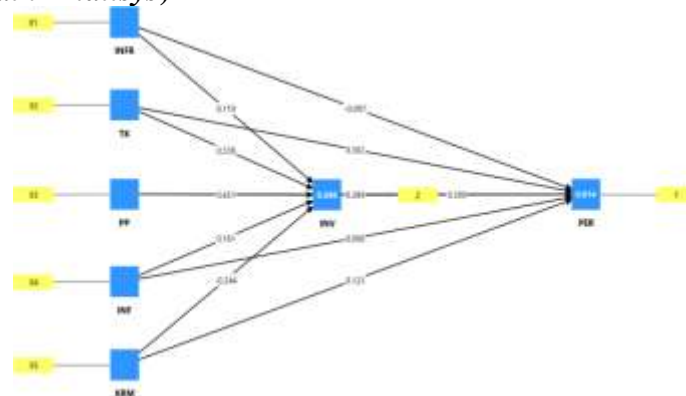
Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Variabel	Nilai DU	Nilai DW	Nilai 4-DU
INV	1,8212	2,045	2,1788
PER	1,8212	2,098	2,1788

Sumber: Diolah Oleh Peneliti dengan SmartPLS, Path Analysis (2025)

Sesuai dengan konsep dasar dalam pengambilan keputusan pada uji autokorelasi, data dikatakan tidak mengandung gejala autokorelasi apabila nilai $DU < DW < 4-DU$. Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai DU 1,8212 dan nilai DW 2,045 dan 2,098. Maka sesuai syarat $1,8212 < 2,045 < 2,1788$, artinya data dalam penelitian ini tidak mengandung gejala autokorelasi. Begitu juga $1,8212 < 2,098 < 2,1788$, artinya data dalam penelitian ini tidak mengandung gejala autokorelasi.

Analisis Jalur (Path Analysis)



Gambar 9

Model Penelitian Analisis Jalur Path (Path Analysis)

Berdasarkan pada Gambar 9 terdapat model penelitian analisis jalur, maka persamaan struktural yang terbentuk adalah sebagai berikut.

$$INV = 0.119 INFR + 0.338 TK + 0.451 PP + 0.161 INF - 0.244 KRM + e_1$$

$$PER = -0.097 INFR + 0.302 TK + 0.389 PP + 0.008 INF + 0.123 KRM + 0.309 INV + e_2$$

Berdasarkan kedua persamaan tersebut, interpretasi koefisien jalur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien yang bernilai positif pada variabel Infrastruktur (INFR), Tenaga Kerja (TK), dan Pengeluaran Pemerintah (PP) dalam persamaan pertama menunjukkan bahwa ketiga variabel eksogen tersebut memiliki pengaruh langsung yang searah terhadap Investasi

(INV). Dengan demikian, setiap peningkatan pada masing-masing variabel eksogen akan meningkatkan nilai Investasi sesuai besaran koefisien jalurnya, dengan asumsi variabel eksogen lain berada dalam kondisi konstan (*ceteris paribus*). Sementara itu, variabel Inflasi (INF) memiliki koefisien positif namun relatif kecil, yang mengindikasikan bahwa kenaikan inflasi memberikan pengaruh peningkatan yang tidak terlalu kuat terhadap investasi. Sebaliknya, variabel Kriminalitas (KRM) menunjukkan koefisien negatif, yang berarti bahwa kenaikan tingkat kriminalitas akan menurunkan nilai Investasi. Besarnya penurunan tersebut proporsional dengan nilai koefisien jalur, dengan asumsi variabel eksogen lainnya tidak berubah.

2. Pada persamaan kedua, terlihat bahwa variabel Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah, Kriminalitas, serta Investasi memiliki koefisien positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (PER). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan keempat variabel tersebut akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar nilai koefisien jalurnya. Sementara itu, Infrastruktur menunjukkan koefisien negatif, yang mengindikasikan bahwa dalam model ini peningkatan infrastruktur justru menurunkan pertumbuhan ekonomi regional, yang dapat disebabkan oleh biaya pembangunan yang tinggi atau ketidakefisienan pemanfaatan infrastruktur pada periode pengamatan. Variabel Inflasi (INF) memiliki koefisien positif dengan nilai yang sangat kecil, menunjukkan pengaruh yang relatif lemah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 5
Hasil Uji Parsial (Uji t)

	Koefisien	Standard Deviation (STDEV)	T Statistic (O /STDEV)	P Values
INFR → INV	0.119	0.057	2.093	0.036
TK → INV	0.338	0.050	6.726	0.000
PP → INV	0.451	0.084	5.374	0.000
INF → INV	0.161	0.070	2.307	0.021
KRM → INV	-0.244	0.073	3.355	0.001
INFR → PER	-0.097	0.026	3.676	0.000
TK → PER	0.302	0.050	6.061	0.000
PP → PER	0.389	0.055	7.078	0.000
INF → PER	0.008	0.020	0.379	0.704
KRM → PER	0.123	0.031	3.958	0.000
INV → PER	0.309	0.030	10.286	0.000
INFR → INV → PER	0.037	0.017	2.141	0.032
TK → INV → PER	0.104	0.019	5.516	0.000
PP → INV → PER	0.139	0.027	5.216	0.000
INF → INV → PER	0.050	0.023	2.189	0.029
KRM → INV → PER	-0.075	0.023	3.290	0.001

2. Ukuran Pengaruh (f^2)

Tabel 6
Nilai Ukuran Pengaruh (f^2)

Variabel	Effect Size INV	Effect Size PER
Infrastruktur	0.023	0.071
Tenaga Kerja	0.079	0.281
Pengeluaran Pemerintah	0.114	0.365
Inflasi	0.032	0.000
Kriminalitas	0.051	0.059
Investasi		0.458

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7
Nilai Koefisien Determinasi (R^2)

Variabel	Adjusted R-Square
Pertumbuhan Ekonomi Regional	0.911
Investasi	0.575

Tabel 7 menunjukkan nilai *Adjusted R-square* untuk variabel Investasi Daerah diperoleh sebesar 0.575. Dengan berdasarkan kriteria yang ada, karena nilai koefisien determinasi lebih besar dari 0.33 dan lebih kecil dari 0.67 ($0.67 > 0.575 > 0.33$) maka variabel Infrastruktur (INFR), Tenaga Kerja (TK), Pengeluaran Pemerintah (PP), Inflasi (INF), dan Kriminalitas (KRM) memiliki hubungan dengan kategori sedang (moderat) terhadap variabel Investasi (INV) yaitu sebesar 57.5%. Nilai *Adjusted R-square* untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi Regional diperoleh sebesar 0.911. Dengan berdasarkan kriteria yang ada, karena nilai koefisien determinasi lebih besar dari 0.67 ($0.911 > 0.67$) maka variabel Infrastruktur (INFR), Tenaga Kerja (TK), Pengeluaran Pemerintah (PP), Inflasi (INF), dan Kriminalitas (KRM) memiliki hubungan dengan kategori tinggi terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi Regional (PER) yaitu sebesar 91.1%.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap Investasi di Indonesia.
2. Tenaga Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap Investasi di Indonesia.
3. Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap Investasi di Indonesia.
4. Inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap Investasi di Indonesia.
5. Kriminalitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara langsung terhadap Investasi di Indonesia.
6. Infrastruktur memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia.
7. Tenaga Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia.
8. Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia.
9. Inflasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia.
10. Kriminalitas memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia.
11. Investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia.
12. Infrastruktur memiliki pengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia melalui Investasi.
13. Tenaga Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia melalui Investasi.
14. Pengeluaran Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia melalui Investasi.

15. Inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia melalui Investasi.
16. Kriminalitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia melalui Investasi.

Saran

Berdasarkan temuan yang telah dikaji, terdapat dua fokus utama saran. Pertama, Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk memperdalam kajian mengenai hubungan antara infrastruktur, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, inflasi, kriminalitas, investasi daerah, dan pertumbuhan ekonomi regional. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian mendatang menambahkan variabel lain seperti teknologi digital, kualitas sumber daya manusia, serta faktor lingkungan untuk memperluas perspektif analisis. Selain itu, penggunaan metode kuantitatif dapat dikombinasikan dengan pendekatan kualitatif agar hasil penelitian lebih komprehensif. Kedua, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pentingnya peran pembangunan infrastruktur, tenaga kerja, dan pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan daya tarik investasi di suatu daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah disarankan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata antarwilayah, meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasional, menyusun kebijakan fiskal dan regulasi yang akan mendorong terciptanya iklim investasi kondusif serta menekan tingkat inflasi dan tingkat kriminalitas pada suatu wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. (1992). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPF.
- Colm, Gerhard & Musgrave, Richard A. (1960). *Public Finance In Theory And Practice*. New York: Random House.
- Felber Lube, J. B. (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 25-36.
- Grigg, N. S. (2000). *Infrastructure Systems: Management, Planning, And Engineering*. New York: Mcgraw-Hill.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage Of Nations*. New York: Free Press.
- Sholikhah, B., Rosyid, A., & Chaniago, S. A. (2022). Pengaruh Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 88–97.
- Todaro, M. P. (2003). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Zaenuddin, M. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pma Di Batam. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 156 – 166.